

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber Lain

- Ardisasmita, M. S. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*.
- Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007). Corruption around the world: Evidence from a structural model. In *Journal of Comparative Economics* (Vol. 35, Issue 3, pp. 443–466). <https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.07.001>
- Handayono, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Penerbit Ombak.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020. In *Www.Antikorupsi.Org*. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>
- Kejaksaan Negeri Karangasem. (n.d.). *Kejaksaan Negeri Karangasem*. Retrieved April 17, 2022, from <http://kejari-karangasem.go.id/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.). *e-Tilang*. Retrieved May 12, 2022, from <https://tilang.kejaksaan.go.id/info>
- Redaksi Warta Bali Online. (2021). *Tuntaskan Dua Perkara Korupsi, Kejari Karangasem Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 69 Miliar*. <https://wartabalionline.com/2021/12/31/tuntaskan-dua-perkara-korupsi-kejari-karangasem-selamatkan-aset-negara-senilai-rp-69-miliar/>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Penerbit Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/Pmk.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga*.
- Menteri Keuangan RI. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/ PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah* (pp. 1–48). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak